

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi Menurut UU 5 Tahun 1974, adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah semata-mata untuk mencapai sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Sebagai wilayah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan

kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo 2002: 169). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah Halim (2002:128), yaitu rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal), rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan (analisis shift), rasio proporsi pendapatan dan belanja daerah (analisis share).

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah Provinsi.

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Halim (2007:233). Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%.

Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi objek dalam penelitian ini memiliki 17 Kabupaten/Kota yang 2 diantaranya merupakan Kabupaten hasil dari pemekaran yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran dari kabupaten Muara Enim dan kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang merupakan pemekaran dari kabupaten induknya yakni Musi Rawas. Secara garis besar selama periode 2011-2015 hampir keseluruhan kabupaten/kota pada provinsi Sumatera Selatan mengalami anggaran yang meningkat di setiap tahunnya. Namun, masing-masing kabupaten/kota mengalami nilai realisasi yang fluktuatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data anggaran dan realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) pada masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2011-2015.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan Periode 2011-2015
(dalam jutaan rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD					Realisasi PAD				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kabupaten Lahat	51.733	76.525	62.156	79.066	92.074	70.066	70.938	78.313	125.319	189.584
2	Kabupaten Musi Banyuasin	53.749	88.207	105.766	129.225	208.787	80.645	96.732	81.364	172.925	181.795
3	Kabupaten Musi Rawas	72.506	76.131	90.319	81.732	100.031	65.428	73.018	75.367	120.153	97.998
4	Kab. Muara Enim	62.161	82.716	101.100	133.627	141.775	86.937	119.456	125.111	138.706	178.245
5	Kab. Ogan Komering Ilir	37.479	41.061	54.165	62.449	138.653	47.387	54.618	68.701	145.591	110.225
6	Kab. Ogan Komering Ulu	39.866	42.913	42.869	68.959	106.821	42.120	41.429	44.680	79.344	98.756
7	Kota Palembang	263.01	458.53	509.788	684.480	773.614	349.570	518.859	558.704	734.219	736.926
8	Kota Prabumulih	24.009	26.877	33.864	51.875	78.442	32.108	40.690	50.623	64.169	72.236
9	Kota Pagar Alam	18.957	25.966	26.170	34.180	35.765	26.993	34.792	29.522	24.727	53.418
10	Kota Lubuk Linggau	30.135	35.019	37.860	51.603	66.299	34.303	39.570	39.967	50.181	66.725
11	Kabupaten Banyuasin	28.376	31.189	39.342	63.873	96.739	29.781	67.767	81.364	98.902	96.219
12	Kabupaten Ogan Ilir	16.102	30.134	63.895	95.980	52.411	21.849	31.742	22.079	49.061	42.843
13	Kabupaten OKU Timur	26.487	23.041	30.864	36.918	53.258	30.631	34.834	36.918	62.418	64.280
14	Kabupaten OKU Selatan	13.113	13.207	13.444	21.360	39.355	13.671	18.949	22.897	18.948	38.197
15	Kabupaten Empat Lawang	10.905	14.603	16.603	20.000	25.480	18.480	21.467	24.230	32.656	27.118

Sumber : www.djpkpd.go.id

Berdasarkan data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa selama lima tahun hampir semua kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera selatan dapat mencapai target, walaupun di beberapa tahun terjadi kenaikan ataupun penurunan realisasi PAD.

Kota Palembang adalah satu dari lima kabupaten/kota dalam periode 2011-2015 dapat mencapai target penerimaan PAD yang telah ditetapkan. target pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak dinilai sangat baik karena dari 11 jenis pajak yang merupakan komponen Pajak asli daerah semuanya telah mencapai target pencapaian. Tercapainya target atau bahkan over target ini dipastikan dapat mempermudah pembangunan di Kota Palembang terlaksana.

Penelitian yang sama telah dilakukan sebelumnya oleh Andri Haryanto (2014) yang meneliti tentang efektivitas, kemandirian dan desentralisasi Pemerintah Kota Medan periode tahun 2009-2013. Penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kemandirian sebagai alat analisis. Rasio efektivitas keuangan daerah pada pemerintah Kota Medan selama periode tahun 2009-2013 hanya pada tahun 2010 mampu mencapai 107,38 persen dengan kategori sangat efektif, dan empat tahun lainnya belum mencapai persentase 100 persen. Rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kota Medan pada tahun 2009-2013 dengan rata-rata sebesar 48,96 dikategorikan rendah karena nilai tersebut berada diantara 25-50 persen, maka Kota Medan dianggap masih memiliki ketergantungan terhadap bantuan pusat dan provinsi. Berdasarkan analisis perbandingan tersebut, peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan daerah yang lebih komprehensif pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Analisis Perbandingan Rasio Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio derajat desentralisasi?
2. Bagaimana kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio ketergantungan?

3. Bagaimana kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio kemandirian?
4. Bagaimana kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio efektivitas?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, yaitu aspek kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio efektivitas, rasio kemandirian sehingga pembahasan dan evaluasi tidak menyimpang dan terarah. Dasar penentuan variabel adalah tinjauan pustaka dari peneliti sebelumnya.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio derajat desentralisasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio ketergantungan.
3. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio kemandirian.
4. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio efektivitas.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman khususnya di bidang analisis laporan keuangan bagi penulis dalam penyusunan skripsi dan sebagai referensi yang bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Sektor Publik dan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya agar dapat terus dikembangkan.
2. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan khususnya bagi para *stakeholder* khususnya pemerintah untuk mengevaluasi kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio kemandirian dan rasio efektivitas keuangan daerahnya.